

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor olahraga memegang fungsi strategis sebagai instrumen kemajuan yang mendongkrak mutu SDM, membangun mentalitas masyarakat, serta menaikkan martabat bangsa pada kancah global. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan bidang keolahragaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Aturan tersebut menetapkan pembagian ruang lingkup keolahragaan mencakup jenis olahraga pendidikan, jenis olahraga rekreasi, serta jenis olahraga prestasi. Secara spesifik, ranah olahraga prestasi difokuskan guna melatih dan menumbuhkan olahragawan secara terstruktur, berjenjang, serta berkesinambungan melalui berbagai ajang kompetisi demi menggapai hasil optimal dengan sokongan ilmu pengetahuan serta teknologi keolahragaan. Kondisi ini membuktikan bahwa pencapaian prestasi seorang atlet tidak hanya sebatas persoalan teknis latihan saja, melainkan menjelma menjadi bagian dari kebijakan publik yang operasionalisasinya dipegang bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Prestasi olahraga pada hakikatnya merupakan cerminan keberhasilan suatu sistem pembinaan yang dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang. Munculnya atlet unggul dan berprestasi tidak terbentuk secara instan, melainkan terbangun melalui alur panjang yang dimulai dari tahap pemassalan, tahapan pembibitan, hingga berakhir pada pembinaan puncak prestasi. Keberhasilan proses tersebut sangat ditentukan oleh ketersediaan kebijakan yang jelas, kelembagaan yang profesional, pendanaan yang memadai, sarana dan prasarana yang layak, pelatih yang berkualitas, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga atau sport science. Ketika salah satu elemen tersebut gagal berfungsi sebagaimana mestinya, maka target pembinaan prestasi akan menemui jalan buntu meskipun kapasitas bakat yang dipunyai sangat melimpah. Berdasarkan alasan tersebut, evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengembangan prestasi atlet menjadi guna menjamin bahwa arah kebijakan yang tersusun dapat diterapkan secara nyata dan membuahkan dampak fungsional di lapangan.

Dalam konteks otonomi daerah, wewenang pembinaan serta pemajuan bidang olahraga prestasi tidak semata-mata dibebankan kepada pemerintah pusat, melainkan turut didistribusikan kepada pihak pemerintah daerah. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan urusan kepemudaan serta keolahragaan sebagai urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, sehingga jajaran pemerintah kabupaten dan kota mempunyai hak prerogatif dan kewajiban untuk menjalankan pembinaan keolahragaan di wilayah masing-masing. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dibantu oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di

tingkat daerah yang berperan sebagai mitra strategis dalam mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, menyelenggarakan pembinaan atlet, serta menyiapkan kontingen daerah untuk mengikuti kejuaraan multicabang. Pola hubungan antara pemerintah daerah, KONI, dan induk organisasi cabang olahraga inilah yang menjadi tulang punggung keberhasilan pembinaan prestasi olahraga di tingkat lokal.

Di Provinsi Jawa Tengah, ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) menjadi barometer utama untuk mengukur keberhasilan pembinaan olahraga prestasi di tingkat kabupaten dan kota. Ajang Porprov diadakan secara berkala dengan mempertandingkan puluhan cabang olahraga serta diramaikan oleh kontingen dari tiga puluh lima kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Capaian medali pada ajang ini tidak hanya menjadi ukuran prestasi atlet secara individu, tetapi juga menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dan KONI dalam melaksanakan kebijakan pembinaan olahraga. Daerah yang berhasil menjadi juara umum dipandang memiliki sistem pembinaan yang berjalan baik, sedangkan daerah yang prestasinya menurun akan mendapat sorotan terkait efektivitas kebijakan dan program pembinaannya. Dengan demikian, Porprov memiliki posisi penting sebagai arena evaluasi sekaligus pembuktian atas implementasi kebijakan keolahragaan daerah.

Pembahasan mengenai pengembangan prestasi atlet, wilayah Kota Semarang merangkak naik menduduki peringkat teratas sesuai mempertahankan gelar juara umum pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah Tahun 2023, yang mana para pejuang olahraga asal Kota Semarang sukses mengumpulkan sebanyak 186 medali emas, 138 medali perak, serta 137 medali

perunggu (KONI Kota Semarang, 2023). Berkat torehan prestasi yang membanggakan itu, segenap atlet serta official Kontingen Kota Semarang memperoleh penghargaan serta menjadi simbol kehormatan bagi warga Kota Semarang. Bentuk apresiasi atas kerja keras para atlet dalam ajang Porprov Jateng 2023 tersebut diutarakan secara langsung oleh Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu ketika menyambut kepulangan kontingen Kota Semarang bertempat di kompleks Jatidiri pada hari Minggu, 13 Agustus 2023. Keberhasilan mempertahankan gelar juara umum ini sekaligus menegaskan posisi Kota Semarang sebagai kekuatan utama olahraga prestasi di Jawa Tengah yang harus terus dijaga keberlanjutannya.

Pencapaian gemilang tersebut tidak bisa dipisahkan dari rangkaian langkah terstruktur yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui perantara KONI Kota Semarang. Kota Semarang melalui KONI memiliki program untuk memonitor segala jenis aktivitas atlet maupun pelatih melalui Program Semarang Emas (PSE). Program Semarang Emas (PSE) adalah skema inisiatif yang dicanangkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI Kota Semarang guna mendongkrak mutu serta prestasi olahragawan Kota Semarang dalam berbagai cabang olahraga. Inisiatif ini diarahkan untuk memaksimalkan persiapan atlet, menaikkan taraf kesejahteraan, serta merebut gelar juara pada berbagai kejuaraan, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Melalui PSE, atlet dan pelatih yang masuk dalam program mendapatkan pembinaan yang lebih terarah, mulai dari pemantauan program latihan, dukungan kesejahteraan berupa honor atau insentif,

hingga fasilitasi mengikuti uji coba dan kejuaraan sebagai sarana mematangkan kemampuan bertanding.

Kehadiran PSE pada dasarnya merupakan bentuk operasionalisasi kebijakan pembinaan olahraga prestasi di tingkat kota. Program ini menjadi instrumen bagi pemerintah dan KONI untuk memastikan bahwa atlet-atlet potensial tidak dibiarkan berkembang sendiri, melainkan dibina secara terukur dengan target prestasi yang jelas. Pemantauan terhadap aktivitas latihan atlet dan kinerja pelatih dilakukan agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan prestasi. Namun, layaknya karakteristik program publik pada umumnya, efektivitas pencapaian PSE tidak sekadar ditentukan oleh rancangan dokumen programnya, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana operasional program tersebut dieksekusi oleh para pelaksana di lapangan, yakni jajaran pengurus KONI, pengurus induk organisasi cabang olahraga, deretan pelatih, serta para atlet itu sendiri sebagai kelompok target sasaran kebijakan.

Studi ini menitikberatkan pembahasannya pada pembinaan olahragawan berprestasi dalam bidang cabang olahraga tinju, yang mana merupakan jenis olahraga mandiri dengan tingkat persaingan amat ketat. Tinju dikategorikan sebagai seni bela diri yang menuntut kesiapan kondisi fisik prima, mencakup unsur kekuatan, kecepatan, kelincahan, koordinasi, daya tahan, hingga daya ledak otot. Mengacu pada pandangan Joni Muis (2016:77), tinju diartikan sebagai cabang olahraga sekaligus seni bela diri yang mempertemukan dua orang peserta berbobot setara untuk saling berhadapan menggunakan kepalan tangan dalam durasi bertanding berinterval satu sampai tiga menit yang dinamakan ronde. Jenis olahraga

ini terbukti diminati oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, kelompok dewasa, hingga golongan orang tua, sebab di samping menyajikan unsur kompetisi yang ketat, tinju turut mempunyai daya tarik hiburan yang memikat penonton.

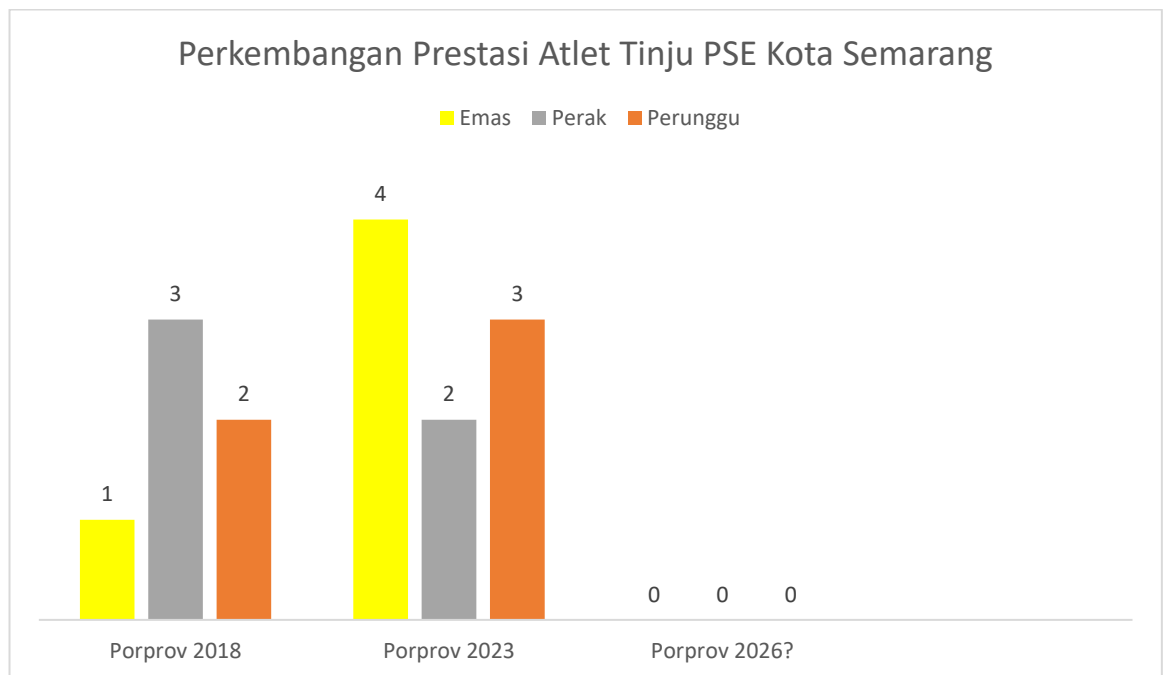
Berdasarkan tinjauan historis, tinju termasuk ke dalam jajaran cabang olahraga tertua di muka bumi. Tinju merupakan aktivitas di mana dua kompetitor saling melayangkan pukulan memakai tangan berlapis sarung tinju, sembari berupaya mengelak dari setiap serangan lawan. Olahraga tinju mulanya dipentaskan oleh peradaban Romawi, Mesir, serta Yunani kuno. Pertandingan tinju era Yunani kuno dikategorikan sebagai bentuk permainan tradisional yang telah eksisting sekurang-kurangnya sejak abad ke-8 SM berdasarkan karya sastra epik Iliad susunan Homer, serta diselenggarakan dalam berbagai latar belakang sosial masyarakat Yunani. Kendati sebagian besar literatur sejarah mengenai tinju Yunani kuno ditemukan dalam kondisi cacat atau hanya berupa cerita rakyat, fakta membuktikan bahwa duel adu pukul menggunakan pelindung tangan tersebut memegang porsi dalam peradaban atletik Yunani klasik (Feri Kurniawan, 2012:59). Bentangan riwayat masa lampau yang panjang ini mengindikasikan bahwa tinju mempunyai dasar tradisi yang kokoh sebagai cabang olahraga prestasi.

Sebagai olahraga yang keras dan berisiko tinggi, tinju menuntut atletnya memiliki kondisi fisik prima, mental yang tangguh, serta penguasaan taktik dan teknik yang baik untuk menunjang performa di atas ring. Komponen kondisi fisik petinju di antaranya adalah daya ledak, kelincahan, dan daya tahan paru. Hal ini sejalan dengan teori ilmu olahraga Bompa (1994:3) yang menyatakan bahwa

latihan merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang secara dinamis dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik. Dengan kata lain, latihan merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan dalam jangka panjang, berulang-ulang, progresif, dan bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik. Selain kondisi fisik, penguasaan teknik dasar juga sangat menentukan. Menurut Greg Brittenham (1998:1), teknik dasar pada olahraga membedakan seorang juara dengan yang lainnya. Pada olahraga tinju, semakin baik seorang petinju dapat menyerang dan bertahan, semakin besar kemungkinannya untuk sukses, namun teknik dasar tersebut akan menjadi terbatas apabila tidak ditopang oleh kondisi fisik yang prima.

Mengacu pada pandangan Mayun Narendra (2002:22), terdapat empat variasi pukulan pokok yang dipelajari dalam cabang olahraga tinju, yakni jenis pukulan jab sebagai teknik pembuka atau pengecoh yang dilontarkan secara lurus ke depan, pukulan straight yang merupakan serangan lurus lanjutan pasca jab, pukulan hook berbentuk ayunan menyudut berdaya dorong besar akibat tumpuan bobot tubuh yang kuat di belakangnya, serta pukulan uppercut berupa hantaman dari arah bawah mengarah vertikal ke atas yang sangat ampuh menaklukkan lawan dengan kebiasaan menundukkan kepala. Penguasaan keempat teknik dasar tersebut, yang dipadukan dengan kondisi fisik prima dan kematangan mental bertanding, merupakan prasyarat bagi seorang petinju untuk dapat berprestasi. Kompleksitas tuntutan inilah yang menjadikan pembinaan atlet tinju memerlukan dukungan sistem yang menyeluruh, mulai dari pelatih yang berkualitas, program latihan yang terukur, sarana latihan yang memadai, asupan gizi yang baik, hingga dukungan kesejahteraan yang layak.

Berdasarkan data yang diberikan oleh KONI Kota Semarang, prestasi tinju Kota Semarang menunjukkan tren kenaikan dalam pengembangan prestasi atlet. Pada ajang Porprov Jawa Tengah Tahun 2018, dari total sembilan nomor yang dipertandingkan oleh petinju Kota Semarang, yaitu tiga nomor putri dan enam nomor putra, Kota Semarang berhasil menyabet satu medali emas pada kelas 52 kg putra, dua medali perak pada kelas 56 kg dan 69 kg putra, satu medali perak pada kelas 48 kg putri, serta dua medali perunggu pada kelas 60 kg dan 75 kg putra. Setelah ajang tersebut, kegiatan olahraga tinju sempat terhenti sejenak dikarenakan wabah Covid-19 yang melanda Indonesia, sehingga Porprov Jawa Tengah yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 harus mundur ke tahun 2023. Terhentinya kompetisi dan pembatasan kegiatan latihan pada masa pandemi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan pembinaan atlet tinju.



Tabel 28.1 Data Prestasi Atlet Tinju PSE Kota Semarang

(sumber: KONI Kota Semarang)

Nama	Berat	Kategori	Medali
Dini	48kg	Elite Women	Perak
Aldila	52kg	Elite Women	-
Kiki	54kg	Elite Women	-
Kemal	52kg	Elite Man	Emas
Rizal	56kg	Elite Man	Perak
Talkhis	60kg	Elite Man	Perunggu
Sampelo	64kg	Elite Man	-
David	69kg	Elite Man	Perak
Pidi	75kg	Elite Man	Perunggu

Tabel 28.2 Data Prestasi Atlet Tinju PSE Kota Semarang
(sumber: KONI Kota Semarang)

Nama	Berat	Kategori	Medali
Berlian	48kg	Elite Women	Perak
Dani	51kg	Elite Man	Emas
Kemal	54kg	Elite Man	Perunggu
Malvin	57kg	Elite Man	-

Bahrn	60kg	Elite Man	Perunggu
Feri	63,5kg	Elite Man	Perunggu
Yahya	67kg	Elite Man	Emas
David	69kg	Elite Man	Emas
Adriano	75kg	Elite Man	Perak
Lalu	80kg	Elite Man	Emas

Tabel 28.3 Data Prestasi Atlet Tinju PSE Kota Semarang
(sumber: KONI Kota Semarang)

Memasuki periode persiapan Porprov 2023, tinju Kota Semarang menunjukkan kebangkitan yang menggembirakan. Pada ajang kegiatan Pra-Porprov di Sukoharjo, Kontingen cabang olahraga tinju Kota Semarang sukses mengantarkan sepuluh petinju untuk bertarung dalam ajang Porprov XVI Tahun 2023 di Kabupaten Pati. Sepanjang kejuaraan Porprov 2023 Pati tersebut, tim tinju Kota Semarang berhasil menyabet predikat juara umum berkat raihan total empat medali emas, dua medali perak, serta tiga medali perunggu. Capaian ini menjadi barometer baru bagi KONI Kota Semarang beserta Pertina Kota Semarang, dimana tinju Kota Semarang ditargetkan harus mampu mempertahankan status juara umum dengan meraih empat emas atau lebih pada ajang Porprov 2026 mendatang. Target

tersebut bukanlah target yang ringan, mengingat daerah-daerah lain juga terus berbenah dan memperkuat pembinaan atlet tinjunya untuk merebut posisi puncak.

Apabila dicermati lebih jauh, perbandingan capaian antara Porprov 2018 dan Porprov 2023 memperlihatkan adanya peningkatan kualitas pembinaan. Pada Porprov 2018 Kota Semarang hanya mampu meraih satu medali emas dari cabang tinju, sedangkan pada Porprov 2023 perolehan emas meningkat menjadi empat keping sekaligus mengantarkan tinju Kota Semarang menjadi juara umum cabang. Beberapa nama atlet bahkan menunjukkan konsistensi prestasi pada dua edisi Porprov tersebut, yang mengindikasikan adanya keberlanjutan pembinaan. Namun di sisi lain, terdapat pula atlet yang belum berhasil menyumbangkan medali, sehingga pemerataan kualitas atlet di seluruh kelas yang dipertandingkan masih menjadi pekerjaan rumah. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan yang telah diraih tidak boleh membuat para pemangku kepentingan berpuas diri, melainkan harus menjadi pijakan untuk memperkuat sistem pembinaan agar prestasi dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Dari sudut pandang yuridis, segala bentuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di lingkungan Kota Semarang telah dipayungi oleh Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2021, khususnya pada ketentuan Bab IV Pasal 6 yang mengulas tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi. Mengacu pada aturan tersebut, para atlet bertalenta dibina secara langsung oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) masing-masing. Adapun ruang lingkup pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana termaktub dalam Perwali Nomor 58 Tahun 2021 Bab IV Pasal 6 meliputi:

- Pengembangan sumber daya manusia pelaku olahraga dan organisasi olahraga;
- Penyusunan metode pengembangan prestasi olahraga;
- Penyediaan sarana dan prasarana;
- Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih.

Selanjutnya, terdapat pula poin-poin pendukung Pasal 6 yang menjadi prasyarat keberhasilan pembinaan olahraga prestasi, yaitu:

- Sport science;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Gizi atau nutrisi yang baik;
- Pelatih yang berkualitas;
- Organisasi yang profesional;
- Anggaran yang cukup;
- Lingkungan latihan yang kondusif.

Keberadaan Perwali Nomor 58 Tahun 2021 tersebut pada hakikatnya merupakan wujud komitmen kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pembinaan olahraga prestasi. Kendati demikian, dalam kaca mata administrasi publik, rumusan peraturan yang ideal di atas kertas sama sekali tidak memberikan garansi mutlak tercapainya target aturan tersebut. Sebagaimana ditekankan oleh para pakar administrasi kebijakan publik, tahap implementasi memegang posisi paling menentukan di dalam siklus kebijakan, sebab pada fase inilah dokumen regulasi diubah menjadi tindakan konkrit. Van Meter dan Van Horn (1975) mengartikan pelaksanaan kebijakan sebagai serangkaian aktivitas yang dijalankan

oleh perorangan, aparat, institusi pemerintah maupun swasta demi mewujudkan target-target yang telah digariskan di dalam produk hukum kebijakan. Di sisi lain, George C. Edward III (1980) menyatakan bahwa faktor penentu keberhasilan eksekusi kebijakan bertumpu pada empat indikator utama, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, orientasi sikap para eksekutor, serta sistem birokrasi. Seluruh landasan teoretis tersebut sangat relevan dipakai guna mengkaji sejauh mana program implementasi kebijakan pengembangan prestasi atlet tinju PSE di Kota Semarang telah direalisasikan.

Berdasarkan hasil sesi tanya jawab awal saat wawancara bersama pihak pelatih, teridentifikasi adanya problematika berupa penurunan kondisi fisik atlet baik saat menjalani sesi latihan maupun ketika bertanding. Penurunan kondisi fisik tersebut diduga disebabkan oleh kurangnya intensitas latihan dan latihan fisik, terlebih pada masa sekarang sebagian atlet lebih menyukai aktivitas hiburan dibandingkan berlatih secara serius. Pengaruh lainnya adalah penguasaan teknik dasar yang masih belum benar. Padahal, di dalam disiplin ilmu keolahragaan, sama sekali tidak ada atlet yang mampu mendulang kemenangan ataupun memperlihatkan performa puncak tanpa ditopang oleh dasar kebugaran tubuh serta penguasaan teknik dasar yang solid. Sekalipun tingkat kesiapan fisik berada pada level prima namun teknik dasar belum dikuasai secara paripurna, maka rangkaian serangan yang dilancarkan akan menjadi kurang optimal. demikian pula sebaliknya. Temuan awal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan komponen penyusunan metode pengembangan prestasi olahraga sebagaimana diamanatkan dalam Perwali Nomor 58 Tahun 2021 masih perlu dipertanyakan efektivitasnya di lapangan.

Permasalahan lain yang sering terjadi di lingkungan latihan datang dari berbagai kalangan, baik pelatih maupun para atlet tinju. Pertama, program latihan dinilai monoton dan cenderung tidak variatif, sehingga berpotensi menurunkan motivasi atlet dan menghambat peningkatan kemampuan. Program latihan yang tidak variatif juga mengindikasikan belum optimalnya penerapan sport science dalam penyusunan program latihan, padahal sport science merupakan salah satu poin pendukung yang secara eksplisit disebutkan dalam kebijakan. Kedua, terkait pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih, di lapangan ditemukan keluhan bahwa penghargaan yang dijanjikan kebanyakan hanya berupa janji manis yang diucapkan tanpa ada wujud nyata. Kondisi ini tentu berdampak pada motivasi dan kesejahteraan atlet maupun pelatih, padahal pemberian penghargaan merupakan salah satu ruang lingkup pembinaan yang diamanatkan langsung oleh Pasal 6 Perwali Nomor 58 Tahun 2021.

Persoalan kesejahteraan dan penghargaan bagi atlet bukanlah persoalan sepele dalam pembinaan olahraga prestasi. Atlet yang merasa tidak dihargai dan tidak terjamin kesejahteraannya berpotensi kehilangan motivasi berlatih, memilih berhenti dari dunia olahraga, atau bahkan pindah membela daerah lain yang menawarkan penghargaan lebih baik. Fenomena mutasi atlet antar daerah menjelang penyelenggaraan Porprov merupakan ancaman nyata bagi daerah yang tidak mampu menjaga kesejahteraan atletnya. Apabila hal tersebut terjadi pada atlet-atlet tinju potensial Kota Semarang, maka target mempertahankan juara umum pada Porprov 2026 akan semakin berat untuk diwujudkan. Oleh karena itu,

kepastian pelaksanaan komponen pemberian penghargaan dalam kebijakan pengembangan prestasi atlet menjadi salah satu isu yang penting untuk diteliti.

Di samping itu, komponen penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran juga patut mendapat perhatian. Pembinaan tinju membutuhkan fasilitas latihan yang memadai, seperti ring tinju yang standar, sasaran pukul, perlengkapan pelindung, serta tempat latihan yang representatif dan kondusif. Ketersediaan gizi dan nutrisi yang baik bagi atlet, yang juga merupakan poin pendukung kebijakan, memerlukan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Berbagai penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan pembinaan olahraga di berbagai daerah, seperti penelitian Lorenza dan Sihabudin (2022) di Kabupaten Ciamis, Surani dan Prathama (2024) di Kota Surabaya, serta Sirait dan Noer (2021) di Kota Tangerang Selatan, secara konsisten menemukan bahwa keterbatasan anggaran, minimnya sarana prasarana, serta belum optimalnya peran pelaksana kebijakan merupakan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pembinaan prestasi atlet. Temuan-temuan tersebut memberikan sinyal bahwa permasalahan serupa sangat mungkin terjadi pula dalam implementasi kebijakan pengembangan prestasi atlet tinju di Kota Semarang.

Melalui sesi wawancara awal yang dilaksanakan kepada jajaran pelatih serta atlet tinju tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam tahapan implementasi kebijakan yang telah diterbitkan oleh Walikota Semarang melalui produk hukum Perwali Nomor 58 Tahun 2021 Bab IV Pasal 6, seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya wajib dicermati secara saksama dan penuh keseriusan. Dengan berpatokan pada ketentuan-ketentuan tersebut, proses penelusuran masalah dapat

dijalankan secara terstruktur sehingga pemecahan atas berbagai kendala yang timbul bisa ditemukan, yang pada akhirnya proses implementasi kebijakan mampu berjalan secara optimal dan efektif. Adanya kekosongan antara apa yang digariskan oleh regulasi dan realitas di lapangan inilah yang melatari lahirnya studi ini, yaitu untuk menelaah bagaimana sesungguhnya kebijakan pengembangan prestasi atlet tinju Program Semarang Emas dijalankan oleh para pelaksananya serta faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat pelaksanaannya.

Kajian terhadap implementasi kebijakan pengembangan prestasi atlet tinju PSE Kota Semarang juga memiliki nilai kebaruan tersendiri. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan pembinaan olahraga umumnya mengambil lokus pada level pembinaan olahraga secara umum atau pada cabang olahraga lain, dan belum ada yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pengembangan prestasi atlet tinju dalam kerangka Program Semarang Emas di Kota Semarang. Padahal, tinju Kota Semarang saat ini menyandang status juara umum Porprov yang harus dipertahankan, sehingga keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pembinaannya akan berdampak langsung terhadap reputasi olahraga prestasi Kota Semarang secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penyempurnaan pelaksanaan kebijakan.

Urgensi dari penelitian ini adalah mengukur sejauh mana implementasi aturan Perwali Nomor 58 Tahun 2021 Bab IV Pasal 6 telah sukses memenuhi target sasaran dalam kerangka pengembangan prestasi atlet tinju PSE Kota Semarang. Target utama yang sangat dinantikan tentu saja upaya mempertahankan gelar juara

umum dalam ajang bergengsi Porprov Jawa Tengah. Pada tahun 2025 ini, ajang Pra-Porprov akan diselenggarakan dan menjadi bahan evaluasi penting bagi para pelatih dan para atlet, karena dari enam belas petinju yang akan bertanding akan terlihat berapa petinju yang lolos untuk berlaga pada Porprov tahun 2026 mendatang. Ketentuan ini tidak berlaku bagi atlet wild card, yaitu atlet yang bermain di Pekan Olahraga Nasional (PON), dimana atlet wild card akan langsung lolos untuk bermain pada Porprov tahun 2026. Momentum Pra-Porprov 2025 tersebut menjadikan penelitian ini semakin relevan untuk dilakukan saat ini, karena hasil penelitian dapat menjadi masukan perbaikan sebelum puncak kompetisi berlangsung.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa di satu sisi Kota Semarang telah memiliki landasan kebijakan yang jelas berupa Perwali Nomor 58 Tahun 2021 serta instrumen program berupa Program Semarang Emas, dan telah pula menorehkan capaian prestasi yang membanggakan pada cabang tinju. Namun di sisi lain, masih ditemukan berbagai indikasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, mulai dari program latihan yang monoton, penurunan kondisi fisik atlet, hingga realisasi penghargaan bagi atlet dan pelatih yang belum sesuai harapan. Kesenjangan tersebut menarik untuk dikaji secara ilmiah melalui pendekatan studi implementasi kebijakan publik. Berdasarkan uraian di atas, peneliti berminat untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Prestasi Atlet Tinju Program Semarang Emas (PSE) di Kota Semarang”.

Identifikasi Masalah

1. Kebijakan ini menjadi landasan bagi Pemkot melalui KONI untuk memberikan binaan bagi para atlet untuk dapat mengembangkan potensi mereka di cabang olahraga terkait khususnya Tinju serta menjadi tugas bagi para pelatih dan pengurus untuk membina dan memberi pelatihan bagi atlet
2. Untuk menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang sudah menjadi tugas bagi para pelatih, atlet, dan pengurus untuk menjalankan program latihan dan mulai memberi pengawasan serta lebih memperhatikan komponen komponen yang tertera pada Perwali Kota Semarang No 58 tahun 2021 agar atlet merasa betah dan meningkatkan potensi mereka untuk meraih prestasi bagi Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya dari latar belakang, yakni isu utama yang menjadi urgensi dari penelitian dan ditelaah lebih dalam serta mencari solusinya, ialah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan atlet prestasi tinju Program Semarang Emas (PSE) di Kota Semarang?

2. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan prestasi atlet tinju Program Semarang Emas (PSE) di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar hakikatnya, tujuan penelitian ialah elemen terakhir yang harus selalu dipakai dengan kuat dari seluruh tahap penelitian. Dalam hal ini, tujuan dalam penelitian ini akan menjadi tolak ukur untuk menilai apakah hasil dari isu dalam penelitian sudah sesuai target diharapkan atau tidak. Oleh karena itu, realistis dalam menetapkan tujuan penelitian dan memungkinkan agar tercapai. Tujuan penelitian bukan hanya merupakan pernyataan kalimat yang menarik untuk menghasilkan output penelitian yang mudah diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan dari studi ini dirumuskan berdasarkan konsistensi antara kerangka teoritis dan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi. Tujuan penelitian yakni :

1. Menjelaskan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Prestasi Atlet Tinju Program Semarang Emas (PSE) di Kota Semarang
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Pengembangan Prestasi Atlet Tinju Program Semarang Emas (PSE) di Kota Semarang

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis juga memahami tujuan penelitian dan potensi kegunaannya. Berikut ini adalah beberapa kegunaan dan relevansi dari penelitian yang ingin dicapai penulis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dengan signifikan dapat menghasilkan suatu kontribusi berharga terhadap kemajuan ilmu dari pengetahuan serta konsep-konsep yang terkait dengan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Prestasi Atlet Tinju Progam Semarang Emas (PSE) di Kota Semarang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Untuk Masyarakat

Berdasar hasil dari peneliti, penulis berharap bisa memberi wawasan serta perspektif berharga dengan digunakan bagi bahan perbandingan untuk mereka yang memerlukan penelitian yang sama pada dasarnya. Penelitian ini juga akan membantu masyarakat memahami masalah yang terkait dengan administrasi publik dan kebijakan publik.

1.4.2.2 Untuk Pemerintah

Berdasar hasil dari peneliti, penulis berharap bisa memberi manfaat untuk Pemerintah Kota Semarang melalui KONI Kota Semarang, dalam proses

mengembangkan prestasi atlet tinju melalui kebijakan Perwali No 58 tahun 2021

Bab 4 Pasal 6 dengan cara yang lebih efisien serta efektif.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA OLEH KOMITE OLAHRAGA NASIONAL	Menjelaskan Implementasi Kebijakan Pemda dalam membina prestasi olahraga oleh KONI Kab Ciamis	Menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975)	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembinaan prestasi olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis masih belum optimal.

	INDONESIA DI KABUPATEN CIAMIS Ina Lorianana Lorenza , Aan Anwar Sihabudin, 2022				Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga pelatih bersertifikat, sehingga pembinaan untuk seluruh cabang olahraga belum dapat dilakukan secara maksimal.
2	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PRESTASI Maslikhah Surani ,Ananta Prathama, 2024	Mengetahui implementasi kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam pembinaan prestasi	Penelitian ini menggunakan teori implementasi George C. Edward III (1980)	Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Persatuan Judo Seluruh Indonesia menggunakan Perda Jawa Timur No. 12 Tahun 2012 sebagai pedoman dalam pembinaan olahraga. Berdasarkan teori George C. Edward III, terdapat kendala pada aspek komunikasi dan sumber daya. Pembinaan prestasi

					masih lebih banyak menjadi tanggung jawab PJSI Kota Surabaya, sedangkan KONI hanya berperan dalam pengawasan. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas. Karena itu, KONI Kota Surabaya sebaiknya diberi kewenangan lebih dalam mengelola fasilitas olahraga agar pembinaan prestasi dapat berjalan lebih maksimal.
3	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMENPORA DALAM PEMBINAAN ATLET	Mendesripsikan implementasi kebijakan kemenpora dalam pembinaan atlet	Menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan	Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pedekatan kualitatif.	Peningkatan prestasi atlet membutuhkan kerja sama semua pihak, seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia, DISPORA,

MENEMBAK PELATNAS MENUJU OLIMPIADE TOKYO 2020 Paragra Duncan Taruma NegaTjijik Rahajura Fuji Sentausa, 2021	menembak Pelatnas menuju Olimpiade Tokyo 2020	Van Horn (1975)		FORMI, pelatih, atlet, dan pihak pendukung lainnya. Namun, ada dua masalah utama yang mempengaruhi prestasi atlet, yaitu keterbatasan dana dan kurangnya sarana olahraga yang memadai. Dana pembinaan, bonus, dan jasa atlet masih sangat minim, sementara banyak fasilitas olahraga belum sesuai standar sehingga atlet harus menyewa tempat latihan dari pihak swasta. Selain itu, sikap dan peran para pelaksana kebijakan juga masih kurang optimal. Ada
---	--	----------------------------	--	--

					beberapa organisasi yang tidak berjalan aktif karena kurang memahami tujuan kebijakan olahraga dan belum mampu mengelola organisasi dengan baik. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya peningkatan prestasi atlet.
4	Implementasi Kebijakan Olahraga Pendidikan sebagai Upaya Pembangunan Melalui Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Sistem	Mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Olahraga Pendidikan sebagai Upaya Pembangunan Melalui Olahraga	Dari analisa implementasi indikator olahraga pendidikan tersebut jika diintegrasikan dengan konsep	Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan agar implementasi kebijakan olahraga Pendidikan bisa terdeskripsikan secara detail	Kebijakan olahraga pendidikan yang dijalankan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga pada dasarnya sudah cukup sesuai dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Namun, pelaksanaannya

	Keolahragaan Nasional, Muhammad Gilang Ramadhan, Amung Ma'mun, Agus Mahendra, 2020	Berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional	(Coakley & Pike, 2015)		masih belum maksimal di beberapa bagian. Beberapa kendala yang ditemukan yaitu sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai, terbatasnya kelas olahraga di sekolah, PPLP yang baru tersedia mulai jenjang SMP, serta belum adanya Sekolah Khusus Olahraga. Selain itu, masih ada beberapa pelaksanaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan aturan dalam sistem pendidikan nasional dan keolahragaan nasional.
5	Kebijakan Pemerintah dalam	Menjelaskan Kebijakan	Menggunakan teori	Jenis penelitian yang di gunakan dalam	Pemerintah telah membuat kebijakan

	Meningkatkan Prestasi Atlit Nasional, Insan Harapan Harahap, 2018	Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Atlit Nasional	implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975)	penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pedekatan kualitatif.	untuk meningkatkan prestasi atlet nasional melalui UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kementerian Pemuda dan Olahraga membagi kebijakan tersebut menjadi kebijakan umum dan khusus, termasuk pembinaan prestasi di bidang sepak bola. Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh besarnya potensi generasi muda, kerja sama pemerintah pusat dan daerah, serta adanya aturan yang
--	--	--	--	---	--

					menjadi dasar pembinaan atlet. Namun, masih ada beberapa hambatan, seperti kurangnya kerja sama antar lembaga olahraga, rendahnya minat masyarakat untuk berolahraga, kurang baiknya sistem pembinaan bakat, fasilitas pelatihan yang belum memadai, dan minimnya dukungan masyarakat terhadap atlet nasional.
6	Mental Toughness Atlet Remaja: Sebuah Penguatan Dukungan Implementasi Kebijakan dalam	Mengetahui Mental Toughness Atlet Remaja: Sebuah Penguatan Dukungan	Mental toughness (ketangguhan mental) memiliki empat	Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap	Hasil kegiatan menunjukkan bahwa ketangguhan mental atlet remaja Papua masih belum seimbang. Dimensi rasa percaya

Olahraga Prestasi, Miftah Fariz Prima Putra1, Untung Muhdiarto dkk, 2023	Implementasi Kebijakan dalam Olahraga Prestasi PPLP Papua	dimensi yang dirumuskan oleh (Gucciardi, Gordon, & Dimmock, 2009) yaitu : Thrive though challenge, Sport awareness, Though attitude, Desire Success	persiapan, tim melakukan koordinasi dengan dinas terkait, memberikan pembekalan kepada mahasiswa olahraga tingkat akhir, serta menyiapkan instrumen tes ketangguhan mental atlet. Tes tersebut mengukur enam aspek mental atlet, yaitu percaya diri, konsistensi, kontrol diri, pola pikir positif, komitmen, dan kemampuan menghadapi tantangan. Pada tahap pelaksanaan, tim mendatangi asrama	diri (confidence) memiliki nilai paling tinggi, sedangkan komitmen (commitment) menjadi yang paling rendah. Sementara itu, aspek lain seperti pola pikir positif, konsistensi, dan kontrol diri berada pada tingkat sedang. Karena itu, ketangguhan mental atlet perlu dipantau secara rutin, misalnya setiap tiga atau enam bulan sekali. Selain itu, hasil pemantauan sebaiknya ditindaklanjuti dengan pelatihan dan pembinaan mental agar kualitas mental atlet
---	--	--	--	---

				atlet binaan Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan tes mental toughness dan mengawasi proses pengisian tes. Setelah itu, pada tahap pelaporan, hasil tes dianalisis bersama mahasiswa olahraga menggunakan analisis deskriptif, kemudian disusun menjadi laporan dan diserahkan kepada pihak terkait.	dapat berkembang lebih baik.
7	Implementasi kebijakan olahraga dan peran pemangku kepentingan	Mendesripsikan Implementasi kebijakan olahraga dan peran	Menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengamatan, wawancara, dan	Peningkatan prestasi atlet membutuhkan kerja sama semua pihak, seperti Komite Olahraga Nasional

	dalam peningkatan prestasi atlet, Juniar Sirait, Khaerul Umam Noer, 2021	pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet	Meter dan Van Horn (1975)	diskusi kelompok terpumpun. Pengamatan dilakukan dengan melihat langsung kondisi fasilitas olahraga dan sarana lain.	Indonesia, Dinas Pemuda dan Olahraga, FORMI, pelatih, atlet, dan pihak pendukung lainnya. Namun, ada dua masalah utama yang mempengaruhi prestasi atlet di Kota Tangerang Selatan, yaitu keterbatasan sumber daya dan kurang optimalnya peran pelaksana kebijakan. Masalah sumber daya terlihat dari minimnya dana pembinaan, bonus, dan jasa atlet, serta fasilitas olahraga yang masih kurang memadai dan belum sesuai standar. Akibatnya, atlet dan pelatih sering harus
--	---	--	----------------------------------	---	--

					menyewa tempat latihan dari pihak swasta. Selain itu, beberapa organisasi olahraga juga belum berjalan aktif karena kurang memahami tujuan kebijakan dan belum mampu mengelola organisasi dengan baik. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pembinaan dan peningkatan prestasi atlet.
8	EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUTU SEKOLAH ATLET	Mengetahui bagaimana proses evaluasi implementasi kebijakan mutu	Menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn dan implementasi	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan evaluasi	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mutu Sekolah Atlet Ragunan secara umum sudah memenuhi standar yang ditetapkan,

	RAGUNAN DKI JAKARTA, JONNI MARDIZAL, 2020	sekolah atlet ragunan DKI Jakarta	oleh Van Horn dan Van Meter.	kebijakan menggunakan model evaluasi CIPP.	baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Dari sisi kebijakan dan tujuan pendidikan, sekolah sudah berjalan sesuai aturan dan memiliki fokus pada peningkatan kualitas serta daya saing atlet. Dalam perencanaan dan pelaksanaan, penerimaan siswa, tenaga pelatih, kurikulum, manajemen sekolah, serta sarana dan prasarana sudah cukup baik dan sesuai regulasi. Namun, perencanaan sumber pembiayaan masih belum optimal.
--	--	--	---	---	---

					Pada hasil akhirnya, prestasi akademik dan nonakademik siswa atlet sudah cukup baik, termasuk prestasi di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Meski begitu, kualitas akademik dan prestasi lainnya masih perlu terus ditingkatkan agar hasil yang dicapai menjadi lebih maksimal.
9	Implementasi kebijakan pelayanan terpadau satu pintu di DPMPTSP Kota Semarang,	Menjelaskan dan menganalisis implementasi kebijakan Perwali No 109 tahun 2021 di DPMPTSP Kota Semarang.	Teori implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter	Menggunakan metode kualitatif deskriptif	Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang mengeksplorasi secara mendalam suatu

	Pramuyatama Henry, 2024				peristiwa, proses, kegiatan, atau satu atau lebih individu
10	EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA, Dian Estu Prasetyo , Damrah , Marjohan, 2018	Menganalisis bagaimana proses evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi olahraga di kabupaten Tebo, Jambi	Menggunakan Teori William Dunn	Jenis penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP model rancangan penelitian kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Tebo masih belum berjalan maksimal. Banyak tenaga dan pembina olahraga yang belum memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi pendidikan, keaktifan, maupun prestasi cabang olahraga yang dibina. Selain itu, masih ada pihak yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok dibandingkan

					kemajuan olahraga daerah. Dari 28 cabang olahraga yang terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia, hanya 13 cabang yang bersedia memberikan informasi kepada peneliti, sementara lainnya menolak untuk diwawancarai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan olahraga di Tebo belum dikelola secara profesional, sehingga prestasi olahraga daerah masih tertinggal dibandingkan kabupaten atau kota lain di Jambi.
--	--	--	--	--	--

Tabel 28.4 Penelitian Terdahulu

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik ialah padanan istilah bahasa Inggris “*public administration*” dan dapat disebut sebagai administrasi (administrasi negara) atau administrasi pemerintahan (Indradi, 2006:110). Chandler (1998), mengutip dari Indradi (2006:114), menggambarkan public administration (administrasi publik) yakni suatu tahapan di mana personil dari publik dan sumber daya dapat disusun serta disinkronkan demi merumuskan, melaksanakan, dan melakukan pengelolaan keputusan kebijakan publik. Sementara itu, Barton dan Chapel, yang juga diambil dari Indradi (2006:116), menggambarkan public administration (administrasi publik) yakni “kerja pemerintah” atau “*the work of Government*” Starling, dalam Indradi (2006:116), Mengatakan bahwa administrasi publik mencakup pelaksanaan tindakan pemerintah sesuai dengan janji kebijakan yang diumumkan selama kampanye pemilihan. Rosenbloom, dalam Indradi (2006:116), mengungkapkan public administration atau administrasi publik sebagai penggunaan aspek-aspek manajemen, hukum, dan politik. berisi penggunaan teori-teori serta pendekatan untuk memenuhi mandat pemerintah di berbagai sektor, dengan tujuan mengatur dan memberikan layanan kepada masyarakat baik secara keseluruhan maupun sebagian.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Dalam perkembangannya, dapat dikenali melalui transformasi dari paradigma yang terjadi. Model menurut definisi Kuhn (Keban, 2014:31), mengacu pada pandangan, nilai, metode, prinsip dasar, atau penyelesaian isu ada diyakini masyarakat selama periode tertentu. Setiap pergeseran paradigma mempunyai ciri khas tersendiri terkait dengan lokasi dan tujuannya. Disiplin ilmu administrasi publik memiliki perkembangan dalam mengikuti arus perkembangan zaman, maka dari itu menurut Nicholas Henry pada tahun 1995 memaparkan pembagian paradigma public administration yang terdiri atas:

1. Paradigma Pertama: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900 – 1926)
2. Paradigma Kedua : Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)
3. Paradigma Ketiga : Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik(1950 – 1970)
4. Paradigma Keempat : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)
5. Paradigma kelima : Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970 – 1990)
6. Paradigma Keenam atau sampai saat ini : Governance (1990 – sekarang)

Setiap perubahan dalam paradigma administrasi publik bertujuan untuk mengatasi kekurangan paradigma sebelumnya dan memberikan perspektif yang lebih luas. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi publik, negara harus cepat dan tepat menanggapi perubahan ini. Maka dari itu, studi ini memusatkan pembahasannya pada paradigma governance di ranah public administration .

1.5.4 Kebijakan Publik

A. Definisi Kebijakan Publik

Pandangan Carl I. Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala hal yang diputuskan oleh pihak pemerintah untuk dikerjakan ataupun tidak dikerjakan sebagaimana dikutip dalam tulisan Nugroho. Di sisi lain, Thomas R. Dye memandangnya sebagai sekumpulan langkah yang diprakarsai oleh individu, kelompok, maupun instansi pemerintahan pada suatu kondisi tertentu dengan memperhitungkan potensi tantangan serta peluang yang ada, demi mengeksplorasi peluang tersebut serta meredam berbagai rintangan dalam rangka mewujudkan target spesifik.

James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai himpunan tindakan berorientasi target yang dijalankan serta dipatuhi oleh seorang aktor atau sejumlah aktor guna menuntaskan problem tertentu.

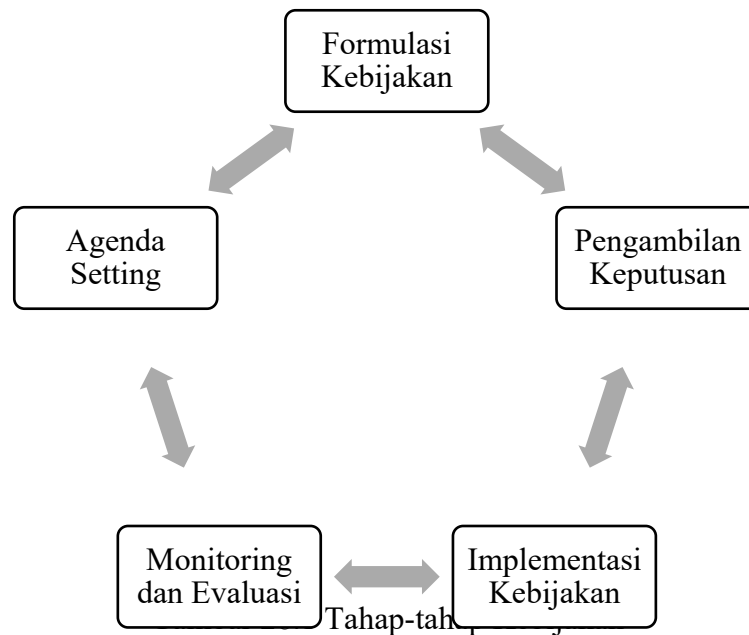
Secara garis besar, kebijakan dipahami sebagai seluruh bentuk tindakan yang dikerjakan oleh instansi pemerintah ataupun kolektivitas subjek demi menyelesaikan suatu persoalan demi menggapai target kolektif di tengah masyarakat.

B. Tahap-Tahap Kebijakan

Rangkaian siklus pembentukan kebijakan melibatkan lima fase berbeda, yang mencakup:

1. Tahap Persiapan Agenda: Periode permulaan ini melibatkan proses penghimpunan secara menyeluruh dan penyatuan bermacam persoalan masa lalu ke dalam daftar agenda kebijakan, supaya kelak dapat dirumuskan ke dalam sistem kebijakan yang resmi.
2. Perumusan Kebijakan: Tahap ini ditandai dengan upaya yang ditujukan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada yang teridentifikasi dalam lanskap kebijakan.

3. Pengambilan Keputusan: Fase ini berkaitan dengan penyelesaian masalah yang diidentifikasi dengan mengeksplorasi berbagai alternatif, yang kemudian diintegrasikan ke dalam agenda kebijakan. Dari berbagai alternatif yang disajikan, satu opsi kebijakan tertentu dipilih, biasanya melalui mayoritas legislatif atau dengan mencapai konsensus di antara interpretasi yudisial.
4. Tahap Implementasi Kebijakan: Periode ini menandakan jalannya eksekusi kebijakan yang sesungguhnya oleh pihak instansi pemerintah pada tataran operasional. Apabila tidak ada implementasi, suatu kebijakan hanya akan berwujud gagasan teoretis belaka. Di samping itu, tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini bertumpu pada kaitannya dengan struktur yang berlaku, yang mana struktur tersebut bisa menunjang ataupun menghambat proses akhirnya.
5. Tahap Monitoring dan Evaluasi: Periode penutup ini mencakup peninjauan terhadap kebijakan yang telah diterapkan, menimbang aspek keselarasan serta tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan target aturan yang telah ditetapkan, sekaligus membandingkan capaian akhir dengan sasaran awal yang telah dirumuskan.



(Sumber: Kebijakan Publik Era Globalisasi)

1.5.5 Implementasi Kebijakan

Proses implementasi yang rumit tidak dapat disangkal merupakan komponen penting dari kerangka kebijakan publik menyeluruh, yang mencakup

tidak hanya tahap-tahap sebelumnya, yaitu pengaturan agenda, perumusan, dan adaptasi, tetapi juga berlanjut ke fase penilaian berikutnya, sehingga menyoroti keterkaitan tahapan ini dalam kontinum kebijakan publik. Penjelasan mengenai konsep implementasi kebijakan turut dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn sebagaimana disitir dalam Sobirin (2017), yang memandangnya sebagai rangkaian langkah aktif yang dikerjakan oleh perseorangan maupun kelompok demi menggapai target yang telah digariskan di dalam produk keputusan kebijakan. Wujud tindakan ini merupakan ikhtiar kolaboratif guna mentransformasikan regulasi yang masih abstrak menjadi ranah operasional yang fungsional sepanjang periode waktu tertentu, atau merepresentasikan program berkesinambungan yang dirancang demi menghasilkan perubahan bermakna sebagaimana digariskan oleh pembuat regulasi terdahulu, sehingga menetapkan bahwa fase implementasi dari kebijakan tertentu bergantung pada penetapan atau artikulasi sebelumnya dari tujuan dan sasaran yang melekat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

Sejalan dengan gagasan yang diungkapkan oleh Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip dalam tulisan Evans (2006), proses implementasi kebijakan berlangsung manakala undang-undang resmi telah disahkan guna memberikan kewenangan program, menjabarkan bentuk keuntungan kebijakan, serta melahirkan keluaran konkret. Pelaksanaan aturan ini dicirikan oleh berbagai aktivitas yang muncul pasca pernyataan pokok mengenai maksud tujuan serta target luasan capaian yang diamanatkan oleh pihak pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam konteks khusus ini, istilah “implementasi” mencakup

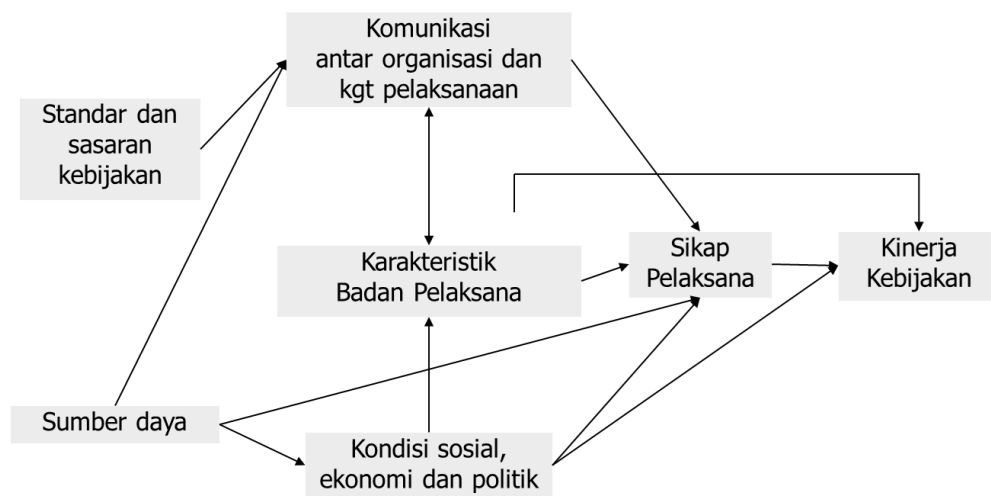
langkah-langkah proaktif dan potensi tidak adanya tindakan dari beragam pemangku kepentingan, terutama entitas yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan program operasional. Berdasarkan pandangan Charles O. Jones, rangkaian implementasi kebijakan dapat dipahami secara mendalam sebagai sekumpulan tindakan terstruktur secara teliti yang berorientasi pada perwujudan suatu program atau kebijakan tertentu, dengan tujuan menyeluruh untuk menghasilkan hasil yang ditentukan, yang secara fundamental didukung oleh tiga kegiatan utama: organisasi, interpretasi, dan penerapan atau pelaksanaan kebijakan yang sebenarnya.

Berikutnya dipaparkan berbagai sudut pandang teoretis mengenai implementasi yang dijadikan landasan pemikiran di dalam studi ini.

1.5.5.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Meter dan Horn (Ratri, 2014:4) merumuskan suatu skema komprehensif guna memahami dinamika implementasi kebijakan publik, dengan mengartikannya sebagai serangkaian langkah terencana yang dieksekusi oleh perorangan, kelompok, maupun instansi pemerintahan, yang seluruhnya diarahkan secara saksama menuju tercapainya target spesifik yang tertuang dalam ketetapan kebijakan terdahulu. Rumusan pemikiran ini mengisyaratkan bahwa proses

eksekusi kebijakan yang kompleks tidak dapat dimulai sebelum diterbitkannya undang-undang atau aturan resmi yang relevan, serta dibarengi dengan penyediaan dukungan anggaran finansial yang diperlukan guna menopang seluruh rangkaian implementasi kebijakan. Lebih lanjut, Meter dan Horn menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian suatu kebijakan harus dijabarkan secara terang-terangan serta terbuka untuk dievaluasi secara ketat, sehingga bisa dipastikan bahwa pelaksanaannya telah sejalan dengan sasaran serta standar baku yang telah ditetapkan.

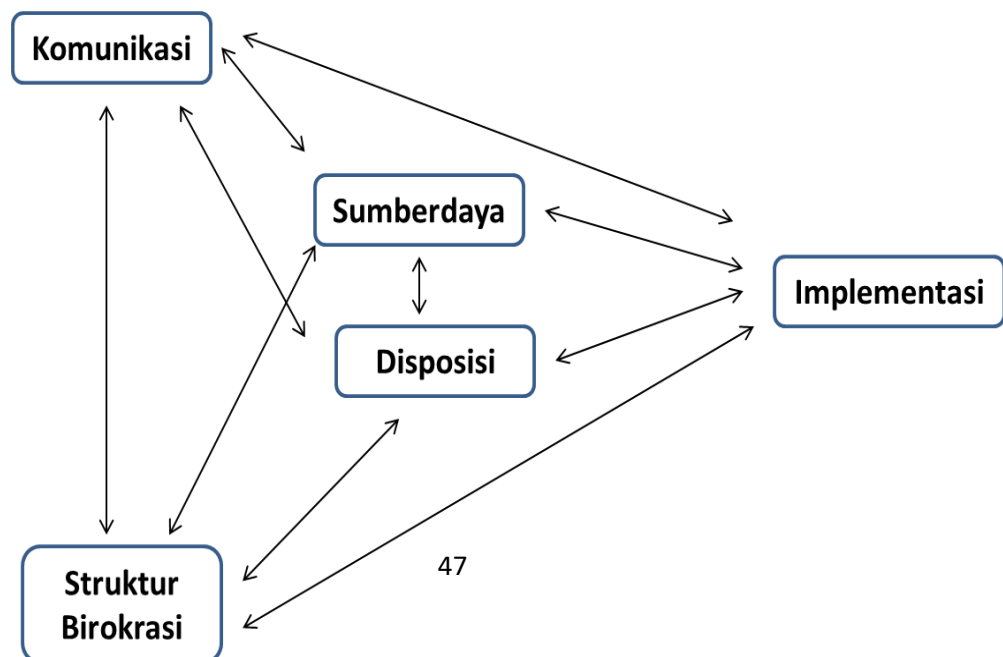


Gambar 28.2 Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

(sumber : Van Meter dan Van Horn)

1.5.5.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Mengacu pada karya ilmiah Mubarak et al. (2020), Edward (1980) memaparkan keberadaan empat dimensi utama yang mempengaruhi kelancaran mekanisme implementasi kebijakan publik, yang meliputi aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, orientasi sikap atau disposisi, serta tata kelola struktur birokrasi secara keseluruhan. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Edward berpendapat bahwa konsep kecenderungan dan perilaku merangkum kemauan intrinsik, keinginan kuat, dan kecenderungan pembuat kebijakan yang berlaku, yang pada dasarnya penting untuk penerapan kebijakan yang bersangkutan dengan sungguh-sungguh, sehingga memfasilitasi realisasi tujuan kebijakan yang dimaksud dengan cara yang bermakna. Agar suatu kebijakan mencapai keadaan implementasi yang efektif dan efisien, sangat penting bahwa pihak yang mengemban tugas eksekusi di lapangan bukan sekadar dituntut paham secara mendalam mengenai prosedur teknis yang mesti dijalankan serta memiliki kecakapan pelaksanaan, melainkan juga harus menunjukkan niat serta dedikasi penuh agar seluruh rangkaian kebijakan tersebut dapat direalisasikan secara sukses.



Gambar 1.3 Model Implementasi Edward III

(sumber : Kebijakan Publik Era Globalisasi)

Edward menjabarkan adanya empat elemen utama, yaitu:

1. Komunikasi

Penyampaian informasi memegang kedudukan sentral dalam menunjang keberhasilan eksekusi kebijakan publik. Apabila arus komunikasi berjalan buruk, tidak transparan, serta menimbulkan kebingungan, maka program pemerintah dipastikan gagal berjalan sesuai harapan. Dampaknya, publik akan bersikap acuh tak acuh karena kehilangan pemahaman mengenai langkah konkrit yang harus diambil tatkala instruksi pusat disampaikan secara membingungkan dan kerap berubah-ubah. Berkaitan dengan kendala penyampaian informasi yang tidak selaras tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab, meliputi:

a. Transmisi

Sebelum mengeksekusi suatu aturan, para eksekutor seyogianya memahami bahwa penerapan kebijakan harus menempuh tahapan tertentu sehingga dampaknya tidak dapat langsung dirasakan secara instan. Pada aspek ini, terdapat sejumlah hambatan dalam proses

penyaluran informasi, di antaranya timbulnya perbedaan pandangan antara pihak pelaksana di lapangan dengan perumus kebijakan. Hambatan berikutnya terjadi tatkala informasi harus mengalir melalui berlapis-lapis jenjang birokrasi, mengakibatkan pesan terlambat sampai dan kehilangan efektivitasnya. Faktor ketiga berkaitan dengan sikap sebagian pelaksana yang enggan memahami persyaratan aturan akibat terhalang oleh persepsi yang bersifat selektif.

b. Kejelasan

Di dalam mengeksekusi suatu kebijakan, pedoman operasional yang diterbitkan tidak cukup hanya diterima oleh para pelaksana saja, melainkan isi pesannya harus disampaikan secara transparan. Sering kali, instruksi program yang dibagikan bersifat kabur dan bermakna ganda, di mana informasi yang tidak utuh tersebut umumnya mengabaikan aspek waktu serta tata cara teknis pelaksanaan, sehingga rentan memicu salah tafsir di kalangan pelaksana.

c. Konsistensi

Diterapkannya sebuah aturan mesti dijalankan secara konsisten dan lugas agar target operasionalnya tercapai secara efektif. Guna menunaikan tugas dengan baik, para

pelaksana tidak hanya dituntut menangkap instruksi secara terang, tetapi juga memastikan bahwa perintah yang diterima tidak saling bertentangan satu sama lain.

2. Sumber daya

Cakupan sumber daya yang diperlukan tidak terbatas pada tenaga manusia semata, melainkan mencakup pula dukungan anggaran finansial, fasilitas perlengkapan sarana prasarana, serta instrumen penunjang lainnya. Apabila alokasi dana dan ketersediaan sarana penunjang dikelola secara tidak efisien sehingga memerlukan durasi pengerjaan yang terlalu lama, maka kebijakan tersebut akan gagal terwujud. Terkait aspek ini, terdapat beberapa faktor penentu dalam elemen sumber daya, yaitu :

a. Staf

Dalam fase eksekusi aturan, keberadaan tenaga pelaksana menjadi elemen yang paling menentukan; meski demikian, kuantitas staf yang melimpah tidak otomatis menjamin hasil positif ataupun menjadi tolok ukur tunggal keberhasilan implementasi.

b. Informasi

Bentuk informasi terbagi menjadi dua kategori, yakni data teknis mengenai tata cara pelaksanaan di lapangan guna menjabarkan petunjuk operasional kebijakan, serta informasi terkait tingkat kepatuhan terhadap regulasi

pemerintah yang menguji sejauh mana para eksekutor taat pada aturan hukum yang berlaku.

c. Wewenang

Setiap program mempunyai batasan otoritas yang bervariasi; dalam suatu institusi, cakupan wewenang yang terbatas atau mengalami defisit otoritas sering kali menghambat kemampuan staf dalam mengeksekusi kebijakan secara tepat.

d. Fasilitas

Sekalipun jumlah staf telah mencukupi, memahami substansi aturan dengan baik, serta mengantongi legitimasi wewenang yang memadai, ketiadaan fasilitas penunjang yang layak akan memperbesar probabilitas kegagalan eksekusi kebijakan tersebut.

3. Disposisi

Faktor disposisi bersinggungan langsung dengan watak serta sikap mental para birokrat tatkala menjalankan kebijakan publik. Di sisi lain, jajaran birokrasi kerap menghadapi tekanan eksternal serta kepentingan pribadi oknum tertentu yang berpotensi menjadi batu sandungan dalam pencapaian target kebijakan. Terwujudnya disposisi yang efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

a. Dampak dari Disposisi

Kendati suatu kebijakan dirancang secara efektif dan memperoleh dukungan luas, manakala substansinya berbenturan secara langsung dengan keyakinan subjektif atau kepentingan personal sang eksekutor, maka para pelaksana tersebut cenderung menggunakan kewenangan diskresi secara terselubung demi memperlambat jalannya kebijakan.

b. Pengangkatan Birokrasi

Apabila personel yang direkrut enggan mengeksekusi arah kebijakan yang dikehendaki oleh para pimpinan puncak, maka kondisi ini akan menjelma menjadi hambatan nyata terhadap jalannya implementasi.

c. Beberapa Insentif

Pengaturan insentif merupakan salah satu strategi yang disarankan oleh Edwards guna meredam resistensi sikap pelaksana. Penyesuaian insentif di sini berfokus pada penataan ulang personel birokrasi, sehingga para pemegang kebijakan level atas memiliki daya dorong yang lebih besar dalam mengarahkan tindakan para eksekutor di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Masyarakat selaku kelompok sasaran penerima manfaat program pemerintah akan mengalami kebingungan tatkala mendapati struktur birokrasi yang saling tumpang tindih, tidak efisien, serta saling berlawanan arah. Tata kelola struktur birokrasi sangat erat kaitannya dengan prosedur operasional baku yang dirumuskan dan dijalankan oleh instansi pemerintah guna menjamin kelancaran kebijakan. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi eksekusi program di dalam elemen struktur birokrasi mencakup:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Desain organisasi memegang fungsi dalam pelaksanaan kebijakan, salah satunya melalui keberadaan SOP. Dokumen prosedur baku ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaksana untuk mengoptimalkan durasi waktu yang tersedia, menyeragamkan pola tindakan pejabat yang majemuk, serta memastikan keselarasan dalam penerapan regulasi.

b. Fragmentasi

Tanggung jawab atas suatu bidang kebijakan tertentu kerap kali terpecah ke berbagai lini, di mana desentralisasi kewenangan yang dijalankan secara ekstrem demi mengejar target sering kali memicu hambatan koordinasi yang parah. Akibat terburuk dari fragmentasi ini adalah kecenderungan para birokrat

untuk menghindari kerja sama lintas instansi dengan dalih memprioritaskan kepentingan sektoral masing-masing.

c. Masalah dan Prospek

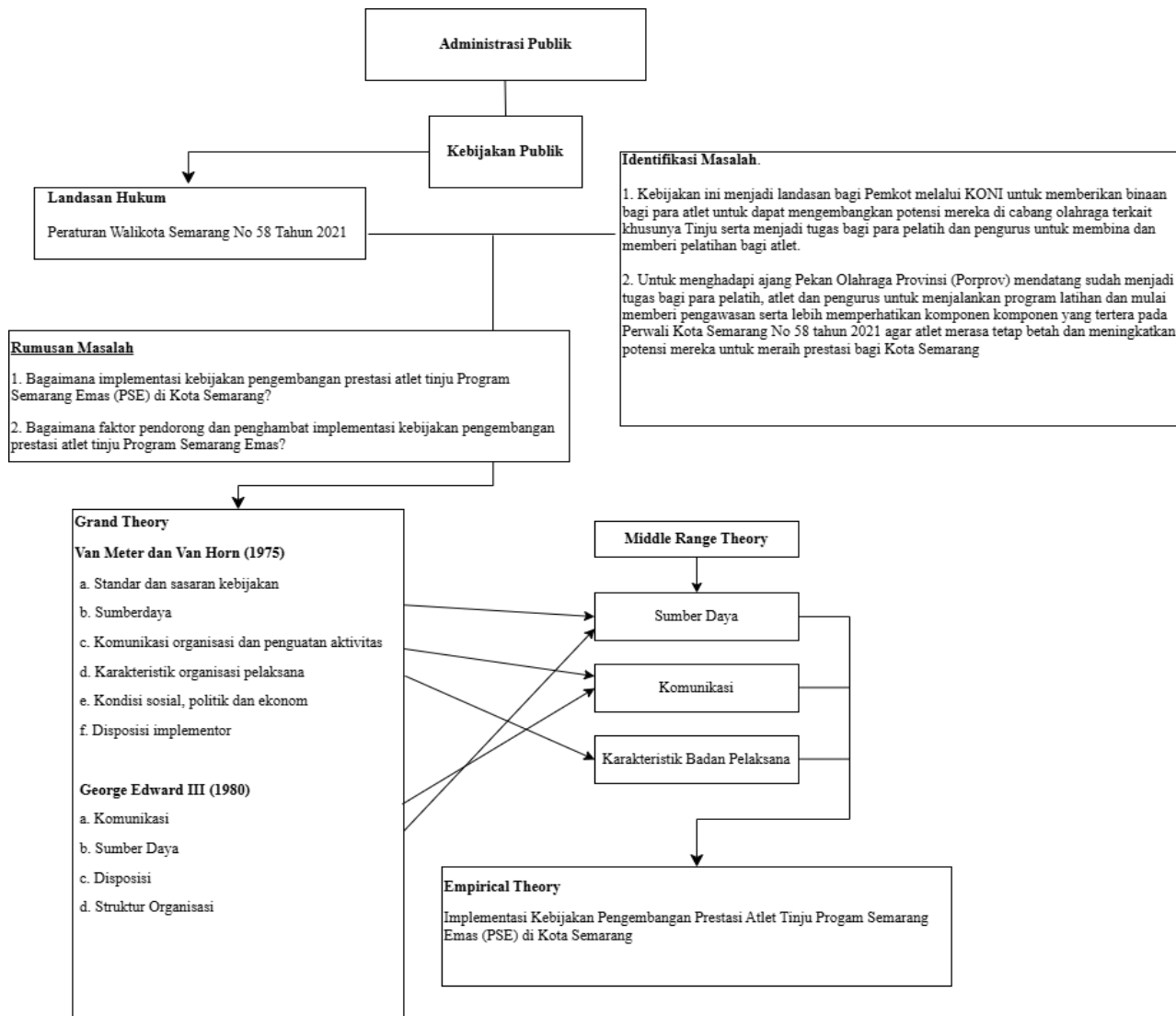
Perjalanan pembentukan suatu kebijakan tidak serta-merta berhenti tatkala draf undang-undang resmi disahkan, instrumen eksekutif diterbitkan, maupun putusan pengadilan dijatuhkan.

	Van Meter Van Horn	Edward
1	Standard dan sasaran kebijakan	
2	Sumber daya	Sumber daya
3	Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana	Komunikasi
4	Karakteristik Badan Pelaksana	
5	Kondisi sosial, ekonomi dan politik	Struktur Birokrasi
6	Sikap pelaksana	Disposisi

Tabel 28.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan
(sumber : diolah dari berbagai sumber)

Penelitian ini menggabungkan kerangka pemikiran teoretis yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn dengan model pendekatan dari Edward III.

1.5.5.3 Kerangka Berpikir



Tabel 28.6 Kerangka Berpikir

1.6 Operasionalisasi Konsep

Pelaksanaan dari kebijakan pengembangan prestasi atlet tinju Program Semarang Emas (PSE) di Kota Semarang dijalankan sebagai wujud tindakan operasional pemerintah daerah lewat sinergi Dinas Kepemudaan dan Olahraga bersama KONI, yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2021 Bab 4 Pasal 6 mengenai pembinaan prestasi olahraga.

1.7 Fenomena Penelitian

1.7.1 Implementasi Kebijakan Pengembangan Prestasi Atlet Tinju

Program Semarang Emas (PSE) di Kota Semarang

Fenomena penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM pelaku olahraga dan organisasi olahraga
2. Penyusunan metode pengembangan prestasi olahraga
3. Penyediaan sarana dan prasarana
4. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih
5. Sport science
6. Sarana dan prasarana memadai
7. Gizi atau nutrisi yang baik
8. Pelatih berkualitas

9. Organisasi yang professional
10. Anggaran yang cukup
11. Lingkungan latihan yang kondusif

1.7.2 Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi

Berbagai unsur pendukung serta hambatan yang mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan pengembangan prestasi atlet tinju Program Semarang Emas (PSE) di Kota Semarang dijabarkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Proses Pertukaran Informasi dalam menjalankan kebijakan pada beberapa pihak yang terlibat

2. Sumber Daya

Ketersediaan aset penunjang pada institusi untuk mengeksekusi sebuah kebijakan dengan dukungan fasilitas mumpuni, tenaga kerja berkualitas, serta alokasi anggaran yang memadai.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dimensi-dimensi yang menentukan tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam menunaikan kewajibannya. Aspek ini menggambarkan cara instansi tersebut bekerja, bersosialisasi dengan kondisi eksternal, serta mengatur penggunaan aset dan personelnya.

1.8 Argumen Penelitian

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga melalui Program Semarang Emas (PSE). Program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi dari berbagai cabang olahraga, termasuk tinju, yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Walaupun demikian, tingkat keberhasilan suatu produk regulasi tidak bisa dinilai semata-mata dari tahap penyusunannya saja, melainkan harus dilihat dari seberapa jauh aturan tersebut dieksekusi secara efektif serta membuahkan hasil fungsional di tataran praktis.

Dalam konteks olahraga tinju, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang muncul antara lain adalah keterbatasan fasilitas latihan, minimnya pelatih bersertifikat, serta kurangnya dukungan anggaran dan program pembinaan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga, KONI, klub tinju, dan sekolah-sekolah

binaan belum optimal dalam menjalankan strategi pembinaan sesuai amanat Perwal. Kondisi tersebut berisiko menghambat kemunculan petinju andal yang sanggup bersaing baik pada tingkat regional maupun skala nasional.

Berdasarkan latar belakang itu, pengkajian terhadap implementasi kebijakan ini amat diperlukan guna mengukur sejauh mana eksekusinya telah berjalan sejalan dengan target yang telah digariskan. Melalui penelaahan terhadap aspek-aspek seperti penyampaian informasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, orientasi sikap pelaksana, hingga sistem birokrasi, studi ini diharapkan mampu mendeteksi titik-titik kelemahan pelaksanaan serta menawarkan usulan regulasi yang lebih tepat sasaran. Target akhirnya adalah menjamin agar Program Semarang Emas tidak sekadar berwujud aturan simbolis semata, melainkan menjelma menjadi sarana strategis dalam melahirkan atlet tinju berprestasi, khususnya di wilayah Kota Semarang.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Berdasarkan pandangan Pasolong di dalam literatur Metodologi Penelitian, kategori jenis penelitian dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

a. Penelitian Deskriptif

Bentuk penyelidikan ini berfungsi memaparkan peristiwa yang sedang berlangsung saat pengamatan dikerjakan. Pengungkapan informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pencatatan, penelaahan, serta penjelasan situasi mutakhir. Tujuan utamanya adalah menggali fakta faktual secara aktual tanpa memerlukan adanya rumusan hipotesis.

b. Penelitian Eksploratif

Bentuk penyelidikan ini bersifat terbuka serta tidak melibatkan hipotesis, sebab wawasan pengamat terhadap fenomena yang diselidiki masih terbatas. Penyelidikan ini umumnya diposisikan sebagai fase pendahuluan bagi penelitian deskriptif, di mana permasalahan yang diangkat dapat dijabarkan secara terperinci.

c. Penelitian Eksplanatori

Bentuk penyelidikan ini mengkaji relasi antarberbagai variabel guna menguji hipotesis yang telah disusun sebelumnya, sehingga sering pula disebut sebagai riset pengujian hipotesis.

Berdasarkan karakteristik tersebut, studi ini menerapkan jenis penyelidikan deskriptif dengan menggunakan rancangan metode kualitatif deskriptif, mengingat fokus kegiatannya berupaya menggali fakta serta fenomena faktual secara objektif berkaitan dengan problem yang dihadapi.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian mengacu pada area geografis tempat dilakukannya suatu pengamatan. Sejalan dengan topik yang diangkat, penyelidikan ini bertempat di Kota Semarang, dengan menetapkan lokus spesifik pada Sasana Tinju Atlet PSE serta kantor KONI di Kota Semarang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian diartikan sebagai entitas yang memegang pengaruh besar terhadap rancangan riset, penghimpunan data, serta keputusan pengolahan data, sehingga dibutuhkan pihak yang benar-benar menguasai bidangnya. Penentuan informan dalam studi ini memakai teknik Purposive Sampling, yakni menetapkan narasumber berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu yang mencakup jajaran Pelatih, Atlet, serta pengurus cabang tinju dan KONI.

1.9.4 Jenis Data

Berdasarkan penjelasan Lofland dan Lofland yang dikutip dalam buku Metodologi Penelitian karya Mayang Sari, ragam data utama dalam riset kualitatif berupa ucapan lisan, tindakan nyata, dokumentasi, serta berbagai instrumen pendukung lainnya. Kategori data yang dimanfaatkan mencakup:

1. Kata-kata dan Tindakan

Ucapan serta perilaku dari subjek yang diamati direkam dalam bentuk catatan tertulis, rekaman video, atau jepretan foto yang nantinya difungsikan sebagai bahan informasi utama. Perekaman data ini dijalankan sebagai bentuk kegiatan memantau, mendengarkan, serta melontarkan tanya jawab.

2. Sumber tertulis

Kategori ini meliputi berbagai bentuk dokumen tercetak berupa majalah ilmiah, buku literatur, arsip resmi, maupun catatan pribadi.

3. Foto

Hasil pemotretan dimanfaatkan untuk menelaah aspek subjektif yang kemudian diolah memakai pendekatan induktif. Di dalam metode kualitatif, jenis foto terbagi menjadi dua, yakni gambar yang diambil oleh pihak lain dan potret yang diproduksi langsung oleh peneliti.

1.9.5 Sumber Data

Secara umum, perolehan informasi terbagi menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder, dengan perincian sebagai berikut:

1. Data Primer

Informasi jenis ini dihimpun secara langsung dari sumber pertama, umumnya memanfaatkan media interaksi seperti sesi wawancara, opini langsung, serta instrumen sejenis (Arikunto, 2002).

2. Data Sekunder

Informasi jenis ini bersumber dari catatan perpustakaan, literatur perusahaan, dokumen resmi, serta berbagai rujukan kepustakaan lainnya (Danang, 2016).

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana diterangkan oleh Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan tahapan strategis dalam riset karena tujuannya adalah memperoleh informasi yang menjadi target utama penelitian. Penyelidikan kualitatif umumnya menggali data dari sumber primer dengan porsi dominan bersandar pada metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perincian teknik penghimpunan data yang diterapkan meliputi:

1. Observasi

Aktivitas pengamatan langsung yang memudahkan pengamat dalam menghimpun informasi spesifik. Objek pengamatan mencakup area lokasi riset, para aktor yang terlibat, serta rangkaian aktivitas yang dikerjakan, dengan dukungan kamera sebagai alat dokumentasi kejadian di lapangan.

2. Wawancara

Sesi tanya jawab yang mempertemukan dua belah pihak dengan pembagian peran sebagai pewawancara dan narasumber, sehingga pengamat memperoleh pemahaman mendalam mengenai situasi di lapangan.

3. Dokumentasi

Arsip pencatatan peristiwa masa lalu berbentuk teks, foto, sketsa, maupun karya seni rupa seperti patung dan gambar. Dokumentasi ini difungsikan sebagai unsur penunjang metode pengamatan dan wawancara, mengingat tidak seluruh dokumen memiliki tingkat validitas yang tinggi (Sugiyono, 2017).

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Prosedur pengolahan data kualitatif melibatkan bahan informasi yang bersumber dari sesi tanya jawab, pengamatan langsung, serta telaah pustaka yang disusun secara terstruktur. Interpretasi data sendiri merupakan proses memaknai temuan riset untuk dihubungkan dengan landasan teoretis. Berdasarkan panduan Bogdan, terdapat beberapa anjuran dalam melakukan analisis dan interpretasi data, yaitu:

1. Area riset harus disesuaikan dengan kapasitas pengamat, yang mencakup pemilihan topik berbasis minat, pemanfaatan hasil riset, penentuan subjek, serta kejelasan latar belakang.
2. Menetapkan metode riset yang selaras dengan tema yang dipilih.
3. Menyusun rumusan pertanyaan yang bersifat analitis, teoretis, maupun formal.
4. Merencanakan jadwal penghimpunan data secara cermat dan terperinci.
5. Melakukan pencatatan teliti terhadap segala hal yang diperlukan.

1.9.8 Kualitas Data

Suatu riset kualitatif wajib memiliki standar tingkat kepercayaan data yang memadai. Guna menguji keabsahan mutu informasi tersebut, studi ini menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu prosedur yang mesti ditempuh peneliti guna menetapkan derajat kredibilitas data yang terkumpul sebelum disusun menjadi laporan akhir (Agustinova, 2015: 45). Mengacu pada pandangan Sugiyono, model triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber, yakni membandingkan beragam data yang digali dari narasumber berbeda dengan menerapkan metode yang setara (2013: 241). Selanjutnya, pelbagai informasi dari hasil wawancara tersebut saling dicocokkan antar-informan guna menghasilkan data yang valid.